

CITRA STATUS SOSIAL PARA HAJI
DI KALANGAN MASYARAKAT
PEDESAAN MADURA
(Oleh Drs. A. Malik Madaniy)

I

Penduduk asli Madura dikenal sebagai masyarakat yang kuat dan teguh dalam memegang identitas mereka sebagai pemeluk-pemeluk agama Islam. Oleh karenanya dapat dianggap sebagai suatu penghinaan dan pencemaran yang berat apabila kepada mereka dilontarkan tuduhan sebagai orang yang bukan Islam. Apakah keteguhan memegang identitas Islam ini sudah diikuti pula dengan kesadaran yang tinggi dalam menghayati dan mengamalkan butir-butir nilai ajaran Islam dalam perilaku kehidupan mereka sehari-hari, baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan aspek peribadatan maupun yang berkaitan dengan aspek sosial kemasyarakatan (*mu'amalah*) dan lain sebagainya; hal ini memerlukan suatu penelitian tersendiri.

Terlepas dari berbagai kemungkinan dalam menjawab pertanyaan di atas, satu hal yang pasti bahwa aspek peribadatan menempati kedudukan yang istimewa dalam kehidupan keagamaan masyarakat Madura.

Ibadah haji sebagai salah satu dari rukun Islam yang lima merupakan ibadah yang memiliki tempat tersendiri di hati orang-orang Madura. Hal ini terbukti dari kenyataan besarnya minat penduduk untuk melaksanakan ibadah ini. Data-data statistik yang ada pada Kantor Pemda Tingkat I Jawa Timur c/q Sub Bagian Urusan Haji dapat memperjelas kebenaran pernyataan ini (A. Malik, 1982/1983 : 20).

Kenyataan besarnya minat berhaji di atas tidak dapat dipungkiri merupakan suatu hal yang menarik perhatian, mengingat di satu pihak ibadah haji sangat banyak bergantung kepada kemampuan finansial seorang Muslim yang di Indonesia dikenal dengan istilah ONH (Ongkos Naik Haji) yang relatif mahal, sehingga tidak mengherankan bila Bernard Lewis menyatakan:

"In practice, statistics show that only a small number of Muslims, especially in the case of those in countries far from Mecca, is able to perform the pilgrimage" (B. Lewis, 1971 : 33); sedang di lain pihak Madura dikenal sebagai pulau yang tandus dan gersang dengan tarap kehidupan ekonomi sebagian besar penduduknya yang masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Propinsi Jawa Timur (Mubyarto, 1983 : 15 - 16). Dengan lain ungkapan, dapatlah dikatakan bahwa bagi sebagian besar orang Madura yang berhasil

menunaikan ibadah haji, ibadah haji benar-benar menuntut pengorbanan yang tidak kecil. Dari sisi ini, dapat dipahami apabila para haji dalam kalangan masyarakat Madura, khususnya di kalangan masyarakat pedesaan dapat memperoleh status sosial yang tinggi melebihi lapisan-lapisan masyarakat awam non haji.

Makalah sederhana ini sengaja disusun untuk mengungkap sejauh mana keberhasilan seseorang telah mampu mengangkat status sosial seseorang ke lapisan yang lebih tinggi dibandingkan dengan status sosial yang telah diperoleh sebelumnya, dan sejauh mana pula terjadi perbedaan antara masyarakat kota dengan desa dalam hal ini. Tinjauan makalah ini akan nampak lebih bersifat pendekatan sosiologis dan agamis dibanding pendekatan-pendekatan yang lain.

II

Keyakinan bahwa ibadah haji merupakan suatu kewajiban agama yang harus ditunaikan segera setelah seseorang merasakan dirinya "mampu" untuk itu dan bahwa menunda pelaksanaan kewajiban ini hingga ajal tiba merupakan suatu dosa, sudah terpatери sedemikian rupa di hati masyarakat, khususnya di lingkungan pedesaan. Oleh karena dapat dipahami bila masyarakat merasa mempunyai kewajiban moral untuk menegur dan mengingatkan salah seorang warganya yang telah dianggap mampu berhaji tetapi belum juga mau melaksanakan. Teguran-teguran ini bisa dilontarkan dalam forum-forum terbuka, terlebih-lebih lagi dalam forum tertutup.

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, terungkap bahwa bagi sebagian besar masyarakat pedesaan Madura ibadah haji merupakan bagian dari cita-cita hidup mereka (A. Malik, 1982/1983 : 72). Dalam hubungan ini faktor keyakinan sebagian besar masyarakat bahwa terkurasnya sedemikian besar harta untuk biaya berhaji tidak akan menyebabkan jatuh pailitnya seorang haji, melainkan peranan yang penting. Agaknya, keyakinan ini diilhami oleh jaminan Rasul dalam salah satu sabdanya :

pembeayaan untuk berhaji adalah sama dengan pembeayaan untuk berjihad di jalan Allah; satu dirham akan diganti dengan tujuh ratus kali lipat" (Al Sayuthiy, t.t : 189) di samping sugesti-sugesti keagamaan yang lain yang didasarkan pada sabda-sabda Rasul pula.

Dalam teori sosiologi dinyatakan bahwa setiap masyarakat pasti memiliki sesuatu yang dihargai yang merupakan bibit yang dapat menimbulkan adanya sistim berlapis-lapis dalam masyarakat (Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, 1964 : 253).

Apabila teori sosiologi ini dihubungkan kepada kasus ibadah haji, maka sepanjang suatu masyarakat memandang penunaian ibadah haji sebagai sesuatu yang sangat berharga dan istimewa, sepanjang itu pula masyarakat akan menempatkan para haji pada lapisan yang relatif lebih tinggi. Kasus para haji di kalangan masyarakat pedesaan Madura membuktikan kebenaran pernyataan ini.

Lebih dari itu sebenarnya penghormatan terhadap para calon haji telah mulai nampak pada hari-hari menjelang keberangkatan sang calon haji ke Tanah Suci, sejak malam-malam *slameddan* (kenduri) yang di daerah pedesaan pada umumnya diadakan sebanyak dua kali, sekali berdoa seperti biasa dan sekali untuk mengkhawatirkan kitab suci.

Pada saat upacara pelepasan keberangkatan, penghormatan terhadap para calon haji nampak semakin semarak. Iring-iringan mobil dan jenis-jenis kendaraan lain yang mengantar keberangkatan sang calon haji menuju pelabuhan cukup pantas mengundang orang luar Madura untuk masgul sejenak, merenungi kenyataan bahwa seorang penduduk desa yang bukan pejabat dan bukan tokoh masyarakat ternyata pada saat berangkat berhaji mampu melibatkan belasan kendaraan untuk mengantarnya.

Tak jauh dari itu pulalah gambaran situasinya bila kelak sang jemaah haji kembali pulang. Di saat itu para jemaah haji asal pedesaan menanggalkan nama-nama aslinya, beralih menyandang nama-nama baru pemberian *Syeikh* (pengusaha/pengelola rumah tempat tinggal para haji selama di Tanah Suci). Di kalangan mereka ini, seolah-olah sudah merupakan suatu keharusan bagi jemaah haji yang sedang berada di Tanah Suci untuk memberitahu sanak keluarga di Madura tentang nama baru yang dipilihkan *Syeikh* untuk dirinya, baik sewaktu di Mekkah maupun sewaktu di Medinah. Agaknya hal ini dianggap perlu dalam rangka mempersiapkan orang-orang di kampung untuk menyambut kehadirannya kembali dengan menggunakan nama baru lengkap dengan atribut : *Ka'towan* untuk kakak, *Lē' towan* untuk adik, *man towan* atau *tē ajjih* untuk paman, *aba* dan *emmi* untuk ayah dan ibu. Adalah suatu hal yang dianggap kurang sopan apabila setelah itu masih ada orang yang memanggil seorang haji dengan menggunakan nama dan panggilan asal, kecuali bagi orang yang belum mengenalnya, dan pengecualian inipun masih bisa ditolerir sepanjang haji yang bersangkutan memang tidak mengenakan tanda-tanda pengenalan kehajian-nya yang biasanya berupa kopiah putih yang acap kali masih dililiti dengan *sorban*. Dalam kasus semacam ini, masyarakat cenderung mempersalahkan sang haji, dengan alasan bahwa ulah perbuatannya sendirilah yang telah memberikan peluang terjadinya kasus ini. Agaknya kasus semacam ini pulalah yang sedikit banyak turut melatar bela-

kangi kesetiaan para haji di pedesaan Madura untuk senantiasa mengenakan kopiah putih sebagai salah satu tanda pengenalan kehajian mereka.

Sehubungan dengan "identifikasi" diri oleh para haji ini, hakekat permasalahannya dapat dikaji dari aspek sosial dan keagamaannya yang lebih mendasar dan terpadu. Dari aspek ini, identifikasi diri oleh para haji tidak semata-mata dilihat sebagai pernyataan kenaikan status sosial mereka dalam masyarakatnya, melainkan lebih dari itu ia merupakan pernyataan kebulatan tekad untuk membuat garis pemisah antara masa lalu dengan hari ini dan hari esok, antara perilaku pada masa lalu (sebelum berhaji) dengan perilaku pada masa kini dan hari esok (setelah berhaji), sebab – seperti apa yang dinyatakan Laurence – status adalah kedudukan yang memberikan hak dan kewajiban, sedangkan role adalah merupakan dinamisasi dari status atau penggunaan hak dan kewajiban itu sendiri (Laurence Ross H, 1963 : 182).

Dari sisi keagamaan, kebulatan tekad para haji untuk membuka lembaran baru dalam hidup mereka ini nampak diilhami oleh sugesti keagamaan, khususnya penegasan Nabi bahwa orang yang berhaji karena Allah dan dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Islam akan kembali seperti pada hari ia dilahirkan dari rahim ibunya, bersih dari segala dosa (Al Bukhariy, tt : 265). Dari sisi ini pula masalah pergantian nama para haji dapat ditelusuri.

Salah satu indikasi kenaikan status sosial para haji di pedesaan Madura nampak pada perlakuan terhadap mereka, khususnya dalam upacara-upacara yang berbau keagamaan. Dalam acara-acara semisal *tahlil* (acara doa bersama untuk arwah orang yang telah meninggal dunia), *haul* (peringatan tahunan meninggalnya seseorang), *walimah* (upacara peresmian akad nikah) dan acara-acara serupa, para haji biasanya ditempatkan di atas *langghar* (langgar) mendampingi para *kiayi* dan *bindharah* (putera atau keluarga kiyai atau orang yang memiliki penguasaan ilmu agama setingkat di bawah kiyai), sementara anggota-anggota masyarakat yang lain ditempatkan di *tanēyan* (halaman rumah).

Perlakuan yang nampak berbeda ini tidak akan pernah mengundang ketersinggungan, karena hal itu seolah-olah memang merupakan konsensus di kalangan masyarakat pedesaan.

Perlu dikemukakan pula di sini bahwa sebagaimana pelaksanaan ibadah haji dapat memberikan dan atau meningkatkan status sosial bagi individu, maka demikian pula halnya bagi keluarga. Dalam pandangan masyarakat pedesaan, semakin besar jumlah para haji dalam suatu keluarga semakin kukuh pula kedudukan keluarga itu di mata

masyarakatnya. Dengan demikian, istilah *bala kraba* (keluarga kuat) yang dikenal dalam masyarakat Madura nampak lebih bermakna, dalam arti telah memperoleh legitimasi dari agama sebagai nilai yang sakral dalam masyarakat. Dengan dilatar belakangi sistim kekerabatan yang kuat, dimungkinkan adanya usaha-usaha yang disengaja untuk ikut serta memperkuat kedudukan keluarga dalam masyarakat. Agaknya, kasus membeayai keberangkatan anggota keluarga untuk berhaji sangat erat kaitannya dengan masalah ini. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila hasil penelitian yang dilakukan penulis pada tahun 1982/1983 menunjukkan bahwa di beberapa desa yang menjadi lokasi penelitian, ternyata sebagian besar dari jumlah haji di masing-masing desa terikat dalam suatu ikatan kekerabatan yang sangat dekat (ayah, ibu, anak, menantu, saudara, kemenakan, saudara sepupu dan yang semisalnya) (A. Malik, 1982/1983 : 87)

Dalam kaitannya dengan teori sosiologi tentang pemilahan status menjadi *achieved status* (yang dapat dicapai oleh setiap orang dengan usaha-usaha yang disengaja) dan *ascribed status* (yang hanya dapat dicapai berdasarkan kelahiran), status sosial yang diperoleh para haji di pedesaan Madura ini jelas termasuk dalam kategori pertama, terbuka kemungkinan bagi setiap orang untuk mencapainya (Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, 1964 : 263).

Oleh karena sifatnya sebagai status yang terbuka dan dapat diusahakan ini pulalah – sesuai dengan teori sosiologi – dimungkinkan terjadinya kejatuhan seseorang dari lapisan atas ke lapisan di bawahnya (Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, 1964 : 254). Hal ini tentunya banyak bergantung kepada kemampuan orang yang bersangkutan dalam berusaha mempertahankannya. Ini jelas sangat mendukung terealisirnya konsep Islam tentang *hajji mabrur* yang – seperti dinyatakan oleh al-Hasan – nampak apabila seseorang kembali dari ibadah haji diikuti oleh ketidakrakusan terhadap materi duniawi, melainkan sebaliknya ia senantiasa mengharap pahala ukhrowi (Sabiq, 1965 : 21), atau dengan lain perkataan, *hajji mabrur* akan nampak dalam perilaku yang semakin meningkat baik dibandingkan sebelumnya.

Berbeda halnya dengan lingkungan masyarakat pedesaan, di lingkungan masyarakat perkotaan pandangan yang menempatkan para haji pada lapisan sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan anggota masyarakat yang lain, pada umumnya sudah semakin menipis bahkan hampir tidak kedengaran lagi. Kalaupun hal itu masih dijumpai di kota, hal itu terbatas pada para haji yang berasal dari desa yang kemudian menetap di kota yang mana mereka itu masih dikuasai oleh kultur yang hidup dalam masyarakat pedesaan (A. Malik, 1982/1983 : 83).

Pergeseran citra status sosial para haji di kalangan masyarakat

perkotaan Madura ini berkaitan dengan perbedaan cara berpikir masyarakat yang – seperti dinyatakan oleh Soerjono Soekanto – cara berpikir masyarakat kota lebih rasional yang didasarkan pada perhitungan eksak yang berhubungan dengan realita masyarakat (Soerjono Soekanto, 1977 : 122).

Di lingkungan masyarakat kota di Madura, para haji tak ubahnya bagaikan anggota masyarakat yang lain. Penghormatan terhadap mereka dalam kepastiannya sebagai haji terbatas pada saat-saat keberangkatan dan penyambutan kembali. Itupun tak semeriah seperti apa yang berlaku di lingkungan pedesaan. Dalam upacara-upacara yang bernafaskan agama sekalipun, tanggapan masyarakat kota terhadap para haji tak berbeda dibanding terhadap anggota-anggota masyarakat yang lain. Kalaupun ada haji-haji yang diperlakukan lebih dari yang lain, hal itu disebabkan karena status-status sosial mereka peroleh di luar kehajiannya. Demikian pula peranan kehajian dalam menopang status sosial dan keagamaan yang telah diperoleh sebelumnya, nampak tidak begitu berarti (A. Malik, 1982/1983 : 79).

III

Dari apa yang telah diuraikan di muka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat pedesaan Madura tentang ibadah haji dan cara pemikiran mereka yang sederhana memungkinkan para haji memperoleh status sosial sebagai orang yang berada pada lapisan atas dalam masyarakat. Akan tetapi apabila terjadi pergeseran persepsi dan pola berpikir, maka status sosial ini tidak akan diperoleh lagi oleh para haji, sebagaimana terbukti pada para haji di kalangan masyarakat perkotaan.
2. Masalah "identifikasi" diri oleh para haji di pedesaan seperti nampak pada penggunaan nama baru lengkap dengan atributnya di samping penggunaan tanda-tanda pengenalan kehajian, tidak harus dilihat hanya sebagai pernyataan kenaikan status sosial mereka, melainkan harus dilihat juga sebagai pernyataan kebulatan tekad untuk membuat garis pemisah yang tegas antara masa lalu dengan masa kini dan masa mendatang dalam bentuk peningkatan kualitas sikap dan perilaku mereka.
3. Mengingat sifat status yang diperoleh para haji di pedesaan Madura termasuk dalam kategori *achieved status* yang terbuka untuk setiap orang yang mampu mengusahakannya, maka dimungkinkan terjadinya penurunan seseorang dari status yang telah diperolehnya. Semua ini tergantung pada sejauh manakah si penyandang status berusaha menjaga dan melestarikannya. Hal ini sangat membantu

terrealisirnya konsep Islam tentang *hajji mabrur*. Dan sepanjang kenyataan ini disadari sepenuhnya oleh para haji, maka pemberian status sosial yang tinggi kepada mereka dapat dianggap sebagai suatu hal yang wajar.

Yogyakarta, awal Juli 1984

DAFTAR PUSTAKA

- A. Malik Madaniy,
1983/1983 *Pola Motivasi Berhaji di Kalangan Masyarakat Madura*, Proyek Peningkatan Sarana Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Al-Bukhariy, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il,
t.t. *Matn al-Bukhariy bi Hasyiyah al-Sindi*, I, Mesir: Isa al-Babiy al-Halabiy.
- Lewis, Bernard,
1971 *Hadjdj*, dalam: *The Encyclopaedia of Islam III*, Leiden: E.J.Brill.
- Mubyarto,
1983 *Pembangunan Manusia Indonesia*, dalam: *Prisma* no. 1 tahun 1983, Jakarta: LP3ES.
- Ross H., Laurence,
1963 *Perspective on The Social Order*, New York: McGraw Hill.
- Sabiq, al-Sayyid,
1965 *Fiqh al-Sunnah V*, Cairo: al-Namudza jiyah.
- Al-Sayuthiy, Jalal al-Din,
t.t. *Al-Jami' al-Shaghir*, Bandung: al-Ma'arif.
- Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi,
1964 *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto,
1977 *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.